

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2006**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategik	4
C. Struktur Organisasi	5

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK

A. Rencana Strategik	8
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	
B. Rencana Kinerja Tahun 2006	10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisa Pencapaian Kerja	14
B. Akuntabilitas Keuangan	18

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	20
B. Saran	21

LAMPIRAN :

Rencana Strategik (RS)	23
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	27
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	33
Pengukuran Pencapaian Sasaran	39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmad dan Hidayah – Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKD Kabupaten Lamongan tahun 2006 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah khususnya di bidang kepegawaian selama satu tahun yaitu tahun 2006.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2006 berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam LAKIP, terutama prediksi-prediksi dan alokasi anggaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2006 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan yang dapat disampaikan, dengan harapan masukan, saran dan petunjuknya untuk penyusunan LAKIP berikutnya dengan memohon Petunjuk dan Bimbingan dari Allah SWT semoga pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kabupaten Lamongan dapat lebih baik, meningkat dan terarah demi terwujudnya “ Good dan Clean Governance.”

Lamongan, Januari 2007

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. JOEMARSONO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 010 079 416

BAB I PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas :

" Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian ".

Disamping itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;**
- 2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;**
- 3. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah ;**
- 4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;**
- 5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;**
- 6. Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;**
- 7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;**
- 8. Penyelenggaraan administrasi PNSD ;**
- 9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;**
- 10. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ;**

11. Penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan berkoordinasi dengan instansi terkait ;
12. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, didukung adanya Personil, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan, sebagaimana table dibawah ini.

• **PERSONIL**

NO.	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH	PANGKAT / GOL. RUANG	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET.
1	Kepala Badan	1	Pembina Tk (IV.b)	1	S 2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina (IV.b)	1	S 2	1	
3.	Kabid	3	- Pembina (IV.a)	2	S 2	2	
			- Penata Tk.I (III.d)	1	S 1	1	
4.	Kasubbag.	3	- Penata (III. c)	1	S 2	1	
			- Penata Muda Tk. I	2	S 1	2	
5.	Kasubbid	9	- Penata (III.d)	2	S 2	2	
			- Penata (III. c)	7	S 1	5	
					D-3	1	
6.	Staf	31	- Penata Tk. I (III.d)	1	S2	4	
			- Penata Muda Tk I (III.b)	7	S 1	21	
			- Penata Muda (III.a)	18	D-4	1	
			- Pengatur Tk I (II.d)	1	SMA	5	
			- Pengatur (II.c)	3			
			- Pengatur Muda Tk I (II.b)	1			
	Jumlah	48	Jumlah	48	Jumlah	48	

• **SARANA DAN PRASARANA**

NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gedung	1 unit	Baik	
2.	Kendaraan roda empat	2 unit	Baik	
3.	Kendaraan roda dua	7 unit	Baik	
4.	Meja kursi eselon II	1 stel	Baik	
5.	Meja kursi eselon III	4 stel	Baik	
6.	Meja kursi eselon IV	12 stel	Baik	
7.	Meja staf	28 buah	Baik	
8.	Kursi lipat	40 buah	Baik	
9.	Filling kabinet	5 unit	Baik	
10.	Kursi tamu	1 stel	Baik	
11.	Almari kayu	7 unit	Baik	
12.	Almari besi	5 unit	Baik	
13.	Brankas	1 unit	Baik	
14.	Rak besi	2 unit	Baik	
15.	Rak kayu	2 unit	Baik	
16.	Almari buku	3 unit	Baik	
17.	Komputer	13 unit	Baik	
18.	Meja komputer	13 unit	Baik	
19.	AC	3 unit	Baik	
20.	Kipas angin	8 unit	Baik	
21.	Wireles	2 unit	Baik	
22.	OHP	1 unit	Baik	
23.	LCD Projector, laptop	2 unit, 2 unit	Baik	
24.	Pesawat telpon	5 unit	Baik	
25.	Faximile	1 unit	Baik	
26.	Jam dinding	7 unit	Baik	
27.	Mesin ketik	5 unit	Baik	
28.	Lambang gambar, foto	4 unit	Baik	
29.	Tabung kebakaran	1 buah	Baik	
30.	Ppn struk & pengumuman	4 buah	Baik	

• PEMBIAYAAN

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1.	APBD Kabupaten		
	- Pendapatan	---	
	- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp 2.455.996.000,00	
Jumlah APBD Kabupaten		Rp 2.455.996.000,00	
2.	APBD I	Rp --	
Jumlah APBD I		Rp --	
3	APBN	Rp --	
Jumlah APBN		Rp --	
Jumlah total 1 + 2 + 3		Rp 2.455.996.000,00	

B. ASPEK STRATEGIK

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian di Kabupaten Lamongan, dalam hal melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dapat dilakukan secara optimal, mengingat keberadaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan letaknya strategis, yakni berada di lingkungan Kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, sehingga pengambilan keputusan / kebijakan dan implementasi kebijakan sangat cepat dan tepat, guna optimalisasi pelaksanaan tugas organisasi dan fungsi koordinasi. Tugas dan fungsi dimaksud memegang peran yang sangat vital dalam menggerakkan roda organisasi perangkat daerah non teknis guna memberikan pelayanan yang terbaik.

Disamping itu dengan semakin bertambahnya sarana/prasarana dan peningkatan jenjang pendidikan pada unsur staf ke jenjang sarjana/S-1 (dengan komposisi S-2 sebanyak 23 %, S-1 sebanyak 60,4%, D-4 sebanyak 2,1 %, D-3 sebanyak 2,1 % dan SMA sebanyak 4,2 %) lebih memantapkan pengetahuan dan kemampuan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BKD.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dibantu oleh staf sebagai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 yang susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ;
 2. Sub Bidang Mutasi I ;
 3. Sub Bidang Mutasi II ;
 4. Sub Bidang Mutasi III ;
- d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian ;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan ;
 3. Sub Bidang Pengembangan Karier ;

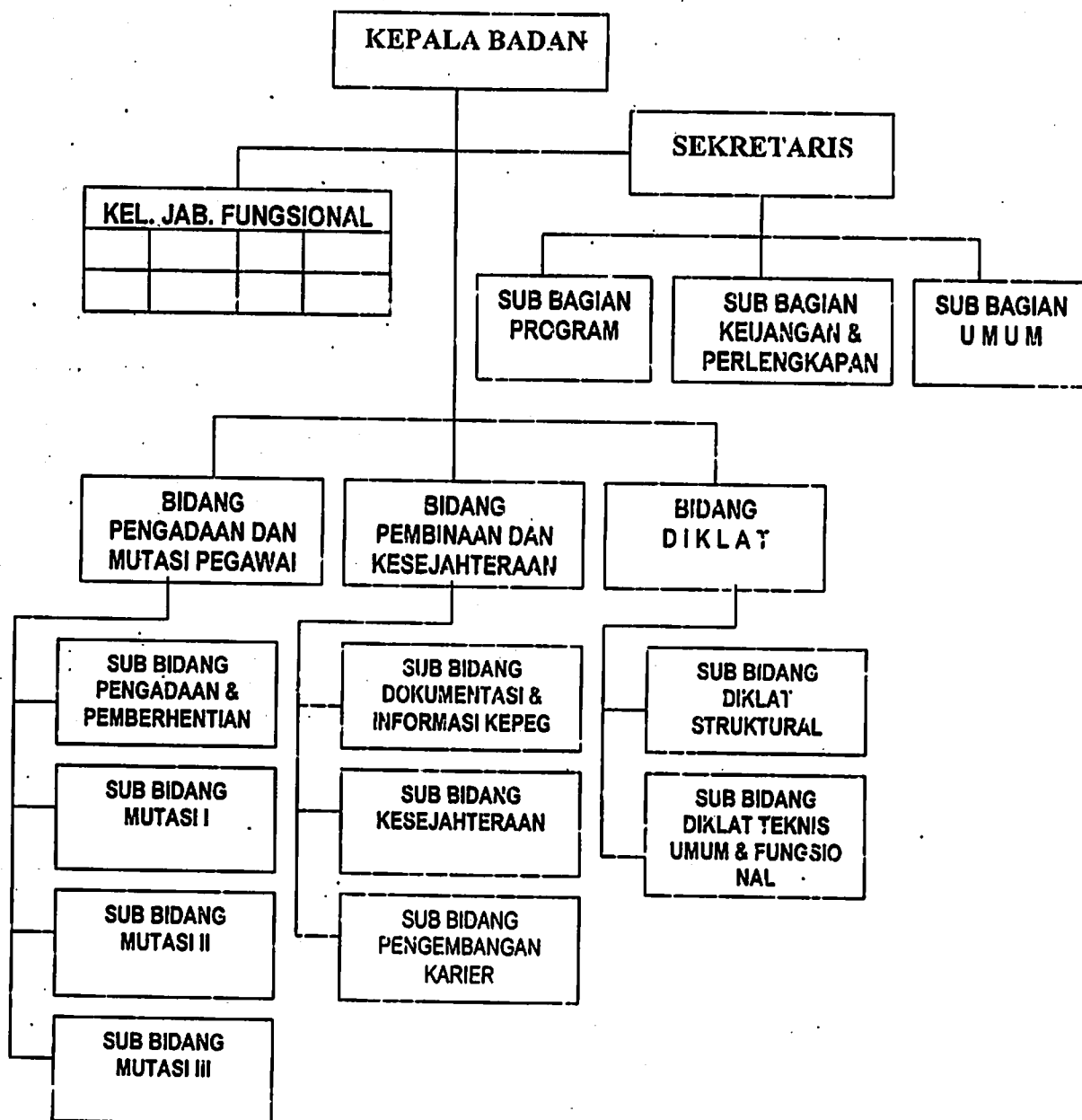
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Sub Bidang Diklat Struktural ;

2. Sub Bidang Diklat Teknis Umum dan fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



BAB II

PERENCANAAN STRATEJIK

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dari pembiayaan baik melalui APBN/APBD yang berorientasi di bidang kepegawaian daerah.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2006.

A. RENCANA STRATEJIK

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawah agar dapat Eksis, Antisipatif dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Badan Kepegawaian Daerah adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Badan Kepegawaian Daerah dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas dan fungsi, maka ditetapkan Visi Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut " Terwujudnya pembinaan, kesejahteraan, pelayanan dan profesionalisme pegawai yang lebih baik dan maju untuk mendukung terlaksananya good dan clean governance."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan harus mempunyai komitmen perubahan ke arah masa depan lebih baik, sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dalam menggerakkan seluruh potensi secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien serta mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan prestasi kerja / kinerja organisasi.

Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan berupaya menetapkan Misi, Tujuan dan Sasaran, yakni :

- Misi

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan pelatihan dan peningkatan disiplin PNS.
2. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas pelayanan dan informasi kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informatika (komputerisasi) dan SDM Aparatur yang profesional.
3. Meningkatkan kualitas pembinaan karier PNS melalui pengembangan pola pembinaan karier dengan melaksanakan prinsip obyektivitas dan prestasi kerja yang dicapai.
4. Meningkatkan ketertiban ketatausahaan kepegawaian dan kerurnah-tanggaan badan.

- Tujuan

1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
2. Meningkatkan disiplin Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kepegawaian.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan karier PNS yang obyektif dan proporsional
5. Meningkatkan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian.

- Sasaran

Mengacu pada tujuan di atas dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi kepegawaian, BKD Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas diklat Aparatur.
2. Meningkatnya ketaatan Aparatur Pemerintah Daerah pada peraturan kepegawaian.
3. Meningkatnya pelayanan dan informasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat.
4. Meningkatnya kualitas pengembangan karier Aparatur Pemerintah Daerah yang obyektif dan proporsional.
5. Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan dan pelaporan kepegawaian.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2006

Rencana Kinerja Tahun 2006 merupakan komitmen terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2006-2009, dengan menetapkan kebijakan dan program dalam rangka mengatasi isu strategis sebagai berikut :

a. Kebijakan :

1. Meningkatkan disiplin dan kinerja sumber Daya Aparatur Pemerintah kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sesuai kebutuhan dan tuntutan pada saat ini.
2. Meningkatkan pelayanan penatausahaan dan informasi kepegawaian secara tertib, cepat, akurat.
3. Meningkatkan pembinaan karier Aparatur Pemerintah secara obyektif dan profesional.

b. Program

1. Penyelenggaraan Diklat Struktural.
2. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional
3. Penyelenggaraan Bimbingan disiplin dan izin perkawinan/perceraian
4. Peningkatan pelayanan karier PNS
5. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
6. Peningkatan pelayanan PAK (Penilaian Angka Kredit)
7. Penyelenggaraan ujian dinas.
8. Pengadaan CPNS yang proporsional
9. Psikotes bagi Pegawai Negeri Sipil.
10. Penyelenggaraan sumpah jabatan
11. Bimbingan Teknis dan Monitoring Ketatausahaan kepegawaian.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang RENSTRA Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

- 85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;
- 70 - < 85 = Baik/berhasil ;
- 55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
- < 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan lancar, hal ini dapat lihat dari pencapaian sasaran, sebagaimana table 3.1 dibawah ini.

TABEL : 3.1
DAFTAR PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2006

NO	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1.	Terlaksananya DIKLATPIM Tk. II, III dan IV	v	-	-	-
2.	Terlaksananya DIKLAT Manajemen Pengelola Pasar	v	-	-	-
3.	Terlaksananya DIKLAT Born Tobe Succes	v	-	-	-
4.	Terlaksananya DIKLAT Manajemen Operasional Pembangunan KB di era Otonomi	v	-	-	-
5.	Terlaksananya DIKLAT Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih	v	-	-	-
6.	Terlaksananya DIKLAT Teknik Budidaya Ikan	v	-	-	-
7.	Terlaksananya TOT KIR/LDKS bagi SMU/SMK Negeri/Swasta	v	-	-	-
8.	Terlaksananya DIKLAT PPGD	v	-	-	-
9.	Terlaksananya DIKLAT Kepenilikan PLS	v	-	-	-
10.	Terlaksananya DIKLAT Guru Kelas IV,V,VI SD Angkatan I	v	-	-	-
11.	Terlaksananya DIKLAT Guru Mata Pelajaran Matematika Tingkat SLTP	v	-	-	-
12.	Terlaksananya penyelesaian kasus indisipliner dan cerai PNS	v	-	-	-
13.	Terlaksananya penanganan pelayanan karir PNS	v	-	-	-
14.	Terlaksananya validasi data dalam SIMPEG	v	-	-	-
14.	Terlaksananya penanganan pelayanan PAK	v	-	-	-
15.	Terlaksananya pelaksanaan ujian dinas KP	-	-	-	v
16.	Terlaksananya penyingkapan CPNS TA 2005	v	-	-	-

NO	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
17.	Terlaksananya penyaringan CPNS TA 2006	-	-	-	v
18.	Terlaksananya penyaringan Pci PP	v	-	-	-
19.	Terlaksananya psikotes bagi PNS	v	-	-	-
20.	Terlaksananya pelaksanaan sumpah jabatan	v	-	-	-
21.	Terlaksananya bimbingan ketatausahaan kepeg.	v	-	-	-

A. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran pertama adalah Meningkatnya Kualitas Diklat Aparatur

Sasaran pertama ini diwujudkan dalam program/kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan diklat struktural
2. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional

Indikator sasaran dan indikator kinerja mencapai 100 %, sebagaimana rincian Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) diukur dari tercapainya sasaran peserta diklat yang dapat terpenuhi keseluruhannya dengan kriteria sesuai bidang yang didiklatkan. Dalam penyelenggaraan diklat-diklat tersebut diharapkan dapat memberikan output bagi peningkatan pengetahuan, kemampuan manajemen maupun teknik kefungsionalan bagi pegawai.

Sasaran kedua adalah Meningkatnya ketatatan Aparatur Pemerintah pada peraturan kepegawaian

Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan bimbingan disiplin pegawai dan izin perkawinan/percerian PNS, termasuk didalamnya adalah

penyelesaian kasus indisipliner dan perceraian PNS. Indikator sasaran dan kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini mencapai 60 %, yaitu terkait upaya menurunkan jumlah kasus indisipliner dan perceraian PNS. Target perkiraan jumlah kasus indisipliner/perceraian PNS yang ditangani tidak dapat di buat mendekati kenyataan, *artinya* dengan semakin kecil angka nyata dari terjadinya tindak indisipliner/perceraian pegawai, maka semakin baik atau menunjukkan peningkatan disiplin dan kepatuhan PNS terhadap peraturan. Namun penyelesaian kasus dapat tercapai 88 %.

Sasaran ketiga adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kepegawaian

Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan karier PNS
- b. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) lanjutan

Indikator sasaran dan kinerja dari pencapaian sasaran ini dapat tercapai rata-rata 97,4 % (masing-masing 99,8 % untuk pelayanan karier PNS dan 95 % untuk pelaksanaan SIMPEG lanjutan).

Sasaran keempat adalah Meningkatnya kualitas pengembangan karier Aparatur Pemerintah Daerah yang obyektif dan proporsional.

Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penanganan pelayanan PAK dengan % pencapaian sasaraannya 96,13 %
- b. Pelaksanaan ujian dinas dengan % pencapaian sasaraannya 30,8 %
- c. Pelaksanaan penyaringan CPNS dan Pol PP pencapaian sasaran 90 %

- d. Penyelenggaraan psikotes, pencapaian sasaran 100 %
- e. Pelaksanaan sum.pah pejabat, pencapaian sasarannya 95 %

Sebagian besar dapat berhasil tercapai, kecuali pelaksanaan ujian dinas yang hanya tercapai 30 %, hal ini disebabkan prediksi PNS golongan II dan III yang akan mengikuti ujian dinas jauh lebih banyak dari angka realita pengajuan nya.

Pengadaan Bantuan Polisi Pamong Praja untuk pemenuhan kebutuhan pada Kantor Pol PP sebanyak 40 orang dan 30 orang disebar ke unit kerja-unit kerja yang membutuhkan. Sedangkan penyelenggaraan pengadaan CPNS tahun 2006 yang diperuntukkan bagi pengangkatan Tenaga Honorer sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, menunggu petunjuk dari pusat.

Sasaran kelima adalah Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan kepegawaian.

Sasaran ini diwujudkan dalam kegiatan bimbingan teknis dan monitoring ketatausahaan kepegawaian. Indikator kinerja tercapai 100 dari ukuran pencapaian sasaran peserta (Pengeiola Kepegawaian) yang diikuti bimbingan teknis. Dari kegiatan ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan, pemahaman dan standart registrasi kepegawaian.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program kegiatan tahun 2006 yang telah dianggarkan dapat dilihat pencapaian sasaran pada table 3.2 dibawah ini

NO	SASARAN	ANGGARAN		%
		RENCANA Rp.	REALISASI Rp.	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Terlaksananya Diklat Pim Tk. II, III dan IV	458.750.000,-	458.507.250,-	99,05
2.	Terlaksananya DIKLAT Manajemen Pengelola Pasar	80.000.000,-	80.000.000,-	100
3.	Terlaksananya DIKLAT Born Tobe Succes	90.000.000,-	90.000.000,-	100
4.	Terlaksananya DIKLAT Manajemen Operasional Pemb. KB di Era Otoda	105.000.000,-	105.000.000,-	100
5.	Terlaksananya DIKLAT Prosedur Pengawasan dan serifikasi Benih	105.000.000,-	104.610.000,-	99,6
6.	Terlaksananya DIKLAT Teknik Budidaya Perikanan	60.000.000,-	60.000.000,-	100
7.	Terlaksananya TOT KIR LDKS bagi SMU/SMK	60.000.000,-	59.990.000,-	99,9
8.	Terlaksananya DIKLAT PPGD	127.500.000,-	125.490.000,-	98,4
9.	Terlaksananya DIKLAT Kepenilikan PLS	112.800.000,-	111.875.000,-	99,2
10.	Terlaksananya DIKLAT Guru Kelas IV,V,VI SD	125.670.000,-	125.545.000,-	99,9
11.	Terlaksananya DIKLAT Guru Mata Pelajaran Matematika Tk. SMP	127.500.000,-	127.290.500	99,8
12.	Terlaksananya Penyaringan CPNS TA 2005	282.300.000,-	282.300.000,-	100
13.	Terlaksananya Ujian Dinas	14.564.150,-	9.224.600,-	63,34
14.	Terlaksananya Pengambilan sumpah jabatan dan sumpah PNS	11.294.550,-	9.219.550,-	81,4
15.	Terlaksananya Analisa beban kerja dan formasi kebutuhan pegawai	9.900.000,-	9.852.900,-	99,5
16.	Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Ketatausahaan kepeg	21.330.000,-	21.330.000,-	100
17.	Terlaksananya SIMPEG Lanjutan	30.923.300,-	28.204.150,-	91,2

NO	SASARAN	ANGGARAN		%
		RENCANA Rp.	REALISASI Rp.	
1.	2.	3.	4.	5.
18.	Terlaksananya Pelayanan PAK	13.007.500,-	11.427.500,-	87,9
19.	Terlaksananya Bimbingan Disilin Pegawai dan Izin Perkawinan/ Perceraian	23.571.500,-	16.935.700,-	71,9
20.	Terlaksananya CPNS TA 2006 dan Pengadaan Tenaga Bantuan Pol PP	495.000.000,-	114.302.850,-	23,1
20.	Terlaksananya Psikotes bagi PNS	36.885.000,-	36.885.000,-	100
21.	Terlaksananya pelayanan karier PNS	65.000.000,-	63.999.800,-	98,5

Melihat pada aspek anggaran tahun 2006, sebagian besar terserap rata-rata 99 %, adapun dari yang terserap 70 – 80 % disebabkan karena menurut kebutuhan rielnya jumlah sasarannya lebih sedikit dibandingkan prediksi/target, misalnya ujian dinas (peserta ujian dinas rielya lebih sedikit dibanding dengan target awal). Sedangkan yang terserap hanya 23,1 % yaitu penyaringan CPNS tahun 2006, hal ini disebabkan karena untuk penyaringan CPNS tahun 2006 diperuntukkan bagi Tenaga Honorar. Oleh sebab itu beberapa pos anggaran tidak dicairkan. Untuk penyaringan CPNS tahun 2006 belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari Pusat.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun Anggaran 2006 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah bidang kepegawaian, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dan sekaligus dipergunakan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara Tim, Individu maupun institusi wadah organisasi.

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Dalam hal pencapaian kinerja pada BKD Kabupaten Lamongan sebagian besar telah menunjukkan keberhasilan (mencapai pencapaian sasaran 80 – 100 %). Adapun ada kegiatan yang pencapaian kinerjanya kurang dan tidak berhasil (30 %), yaitu pada pelaksanaan kegiatan ujian dinas disebabkan pada jumlah PNS yang mengajukan dan mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat lebih sedikit dari perkiraan atau rencana tingkat capaian yang telah ditentukan sebelumnya. Namun secara umum tidak mempengaruhi penilaian kinerja keseluruhan dari BKD Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat memberikan motivasi terhadap capaian kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga melaksanakan tugas dan fungsi di Tahun Anggaran 2006 maupun Tahun Anggaran yang akan datang dapat berjalan dengan lancar dan baik.


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
BN. SOEMARSONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 079 416

RENCANA STRATEGIK TAHUN 2006

Formulir RS

- Instansi** : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
- Visi** : Terwujudnya pembinaan, kesejahteraan, pelayanan dan profesionalisme pegawai yang lebih baik dan maju untuk mendukung terlaksananya good san clean governance.
- Misi** :
1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan pelatihan dan peningkatan disiplin PNS
 2. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas pelayanan dan informasi kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informatika (komputerisasi) dan SDM Aparatur yang profesional
 3. Meningkatkan kualitas pembinaan karier PNS melalui pengembangan pola pengembangan karier PNS dengan melaksanakan prinsip obyektifitas dan prestasi kerja yang dicapai
 4. Meningkatkan keterlibatan ketatausahaan kepegawaian.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya	Meningkatnya kualitas aparat	Jumlah peserta DIKLATPIM Tk. II, III dan IV	Meningkatkan disiplin dan kinerja Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sesuai kebutuhan dan tuntutan pada saat ini.	1. Penyelenggaraan DIKLAT Struktural	6

1	2	3	4	5	6
		• Jumlah peserta DIKLAT Manajemen Pengelola Pasar • Jumlah peserta DIKLAT Born Tobe Succes • Jumlah peserta DIKLAT Manajemen Operasional Pembangunan KB di Era Otoda • Jumlah peserta DIKLAT Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih • Jumlah peserta DIKLAT Teknis Budidaya Perikanan • Jumlah peserta TOT KIR/ LDKS bagi SMU/SMK • Jumlah peserta DIKLAT PPGD • Jumlah peserta DIKLAT Kepenilikan PLS		2. Penyelenggaraan DIKLAT Teknis Fungsional	

1	2	3	4	5	6
		Jumlah peserta DIKLAT Guru Kelas IV,V,VI SD angkatan I			
		Jumlah peserta DIKLAT Guru Mata Pelajaran Matematika Tingkat SLTP			
2. Meningkatkan disiplin Aparatur Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketaatan Aparatur Pemerintah pada peraturan kepegawaian	% Menurunnya Jumlah kasus indisipliner dan cerai PNS.		Bimbingan disiplin pegawai dan izin per-kawinan/ perceraian	
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kepegawaian	Meningkatnya pelayanan dan informasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat	• Jumlah penanganan pelayanan karier PNS • SIMPEG : Pemutakhiran data peg.	Meningkatkan pelayanan penatausahaan dan informasi kepegawaian .	1. Peningkatan pelayanan karier PNS 2. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	

1	2	3	4	5	6
4. Meningkatkan kualitas pembinaan pembinaan karier PNS	Meningkatnya kualitas pengembangan karier Aparatur Pemerintah Daerah yang obyektif dan proporsional	- Penanganan pelayanan PAK - Jumlah PNS lulus ujian dinas KP - Jumlah penyingkiran CPNS TA. 2005 - Jumlah penyingkiran CPNS TA 2006 - Jumlah Pol PP yang terekrut - Jumlah penyelenggaraan Psikotes - Jumlah PNS yang diambil sumpah jabatan	Meningkatkan pembinaan karier Aparatur Pemerintah secara obyektif dan profesional.	1. Peningkatan pelayanan PAK 2. Penyelenggaraan ujian dinas 3. Pengadaan CPNS yang proporsional 4. Psikotes bagi PNS 5. Penyelenggaraan sumpah jabatan	
5. Meningkatkan pengendalian ketatausahaan kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan kepegawaian	Jumlah peserta bimtek (pengelola Kepegawaian)		Bimbingan ketatausahaan kepegawaian	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2006

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

Formulir RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya kualitas diklat Aparatur	Jumlah peserta DIKLATPIM Tk. II, III dan IV	55 orang	1. Penyelenggaraan Diklat Struktural Aparatur Daerah	1. Penyelenggaraan DIKLATPIM Tk. II, III, IV	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklatpim Tk. II, III dan IV Pjb struk Outcome : Terdiklatnya Pejabat Struktural	Rupiah Orang Orang	458.750.000,- 55 orang 55 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Manajemen Pengelola Pasar	40 Orang	2. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Aparatur Daerah	1. Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pengelola Pasar	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Pengelola Pasar Outcome : Terlatihnya Pengelola Pasar	Rupiah Orang Orang	80.000.000,- 40 orang 40 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Bom Tobe Succes	30 orang		2. Penyelenggaraan Diklat Bom Tobe Succes	Input : Dana Output : Terlaksananya Bom Tobe Succes Outcome : Terdiklatnya Pejabat Struktural	Rupiah Orang Orang	90.000.000,- 30 orang 30 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah peserta Diklat Manajemen Operasional Pemb. KB di Era Otoda	40 orang		40 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Operasional Pemb. KB di Era Otoda	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Mana jemen Operasional Pemb KB di Era Otoda Outcome : Terlatihnya Petugas KB	Rupiah Orang Orang	105.000.000,- 40 orang 40 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih	40 orang		4. Penyelenggaraan Diklat Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Pro sedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih Outcome : Jumlah lulusan diklat	Rupiah Orang Orang	105.000.000,- 40 orang 40 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Teknik Budidaya Perikanan	30 orang		40 Penyelenggaraan Diklat teknik Budi daya Perikanan	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Tek- nik Budidaya Perikanan Outcome : Jumlah lulusan diklat	Rupiah Orang Orang	60.000.000,- 30 orang 30 Orang	
	Jumlah peserta TOT KIR/LDKS bg SMU/SMK Negeri/ Swasta	20 Orang		6. Penyelenggaraan TOT KIR/LDKS bg SMU/SMK Negeri/ Swasta	Input : Dana Output : Terlaksananya TOT KIR SMU/ SMK Outcome : Terlatihnya Guru SMA/SMK dalam KIR	Rupiah Orang Orang	60.000.000,- 20 orang 20 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah peserta DIKLAT PPGD	40 orang		7. Penyelenggaraan Diklat PPGD	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat PP GD bagi Tenaga Medis/ Para Medis Outcome : Terlatihnya Tenaga Medis/Para Medis	Rupiah Orang Orang	127.500.000,- 40 orang 40 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Kepeni- likan PLS	40 orang		8. Penyelenggaraan DIKLAT Kepeni- likan PLS	Input : Dana Output : Terlaksananya DIKLAT Kepemilikan PLS Outcome : Terlatihnya PLS	Rupiah Orang Orang	112.800.000,- 40 orang 40 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Guru Kelas IV,V,VI SD	40 orang		9. Penyelenggaraan DIKLAT Guru Kelas IV,V,VI SD Angk. I	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Guru Kelas IV,V,VI SD Outcome : Terlatihnya Guru Kelas IV,V,VI SD	Rupiah Orang Orang	125.670.000,- 40 orang 40 orang	
	Jumlah peserta DIKLAT Guru Mata Pelajaran Matema- tika Tk. SMP	40 orang		10. Penyelenggaraan DIKLAT Guru Mata Pelajaran Matema- tika Tk. SMP	input : Dana Output : Terlaksananya DIKLAT Guru Mata Pelajaran Matematika Tk. SMP Outcome : Terlatihnya Guru Matematika SMP	Rupiah Orang Orang	127.500.000,- 40 orang 40 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.Meningkatnya ke- taatan Aparatur Pemerintah pada peraturan kepe- gawaian.	Menurunnya jum- lah kasus indisi- pliner dan cerai PNS	20 %	Bimbingan disiplin pegawai dan izin per kawinan/perceraian	Penyelenggaraan bimbingan disiplin pegawai dan izin kawin / cerai	Input : Dana Output : Jumlah kasus Indisipliner PNS yang terselesaikan Pengadaan buku pedo- man peraturan perkawin- an/ perceraian Outcome : % Peningkatan penyele- saian kasus indisi- pliner PNS	Rupiah Kasus Eks %	23.571.500,- 25 kasus 250 Eksemplar 80 %	
3.Meningkatnya pe- layanan dan infor- masi kepeg. scr. cepat, tepat dan akurat	1.Jumlah penanga- nan pelayanan karier PNS 2.SIMPEG : Pemutakhiran data	2500 orang 11.000 data	1. Peningkatan pelaya- nan Karier PNS 2. Penyediaan SIM PEG	1.Pemrosesan peng- ajuan kenaikan pangkat 2.Pemrosesan pemu- takhiran data kepe- gawaian dalam SIMPEG	Input : Dana Output : usulan yang diproses Outcome : SK KP yang diterbitkan Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : % pemutakhiran data	Rupiah berkas lembar Rupiah data %	65.000.000,- 2550 berkas 2550 lembar 30.923.300,- 11.000 data 95 %	
4.Meningkatnya kualitas pengem- bangan karier Aparatur Pemth yg obyektif dan proporsional	1.Jumlah penanga- nan PAK 2.Jumlah PNS lulus ujian dinas KP 3.Jumlah penyaring an CPNS 4.Jumlah peserta psikotes	2100 usulan 150 orang 583 orang 67 orang	1.Peningkatan pelaya- nan PAK 2.Penyelenggaraan ujian dinas 3.Pengadaan CPNS yang proporsional 4.Psikotes bagi PNS 5.Penyelenggaraan sumpah jabatan	1. Pemrosesan PAK ja- batan fungsional	input : Dana Output : Berkas yang diproses Outcome : SK PAK yang diterbitkan	Rupiah Berkas Lembar	13.007.500,- 1500 lembar 1500 lembar	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2. Penyelenggaraan ujian dinas KP	Input : Dana Output : Penyelenggaraan ujian dinas KP Outcome : Jumlah PNS yang lulus ujian	Rupiah Orang Orang	14.564.150,- 150 orang 150 orang	
				3. Penyusunan analisa kebutuhan peg	Input : Dana Output : Data yang dianalisa Outcome : Data analisa yang dihasilkan	Rupiah Unit eksp	9.900.000,- 45 orang 5 eksemplar	
				Pengadaan CPNS th 2005 yang diselenggarakan th. 2006	Input : Dana Output : Pengadaan CPNS th. 2005 Outcome : Jumlah CPNS yang terekrut	Rupiah Kegiatan Orang	262.300.000,- 1 kegiatan 583 orang	
				Pengadaan CPNS th 2006 dan pengadaan bantuan Pol PP	Input : Dana Output : Pengadaan CPNS th. 2006 Outcome : Jumlah CPNS yang terekrut th. 2006 Jumlah Pol PP terekrut	Rupiah Kegiatan Orang Orang	495 000.000,- 2 kegiatan 394 orang 70 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Penyelenggaraan psikotes bagi PNS	Input : Dana Output : Penyelenggaraan psikotes PNS Outcome : Data hasil psikotes PNS	Rupiah orang lembar	36.885.000,- 67 orang 67 lembar	
				5. Penyelenggaraan sumpah jabatan	Input : Dana Output : Pengadaan sumpah jbt. Outcome : PNS yang diambil sumpah jabatan	Rupiah kegiatan orang	11.294.550,- 2 kegiatan 240 orang	
5. Meningkatnya tertib administrasi keatausahaan kepegawain	% peningkatan kualitas pengelolaan kepegawain	Jumlah peserta bimbingan teknis keatausahaan kepegawain	Bimbingan keatausahaan kepegawain	Penyelenggaraan bimbingan teknis keatausahaan kepegawain dan monitoring	Input : Dana Output : Bimtek dan monitoring keatausahaan kepegawain Outcome : Jumlah Pengelola Kepegawain yg. dibimtek	Rupiah kegiatan orang	21.330.000 2 kegiatan 40 orang	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2006

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

Formulir PKK

PROGRAM	KEGIATAN					Prosentase Pencapaian Renc. Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tk. Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Penyelenggaraan DIKLAT Struktural Aparatur Daerah	1. Penyelenggaraan DIKLAT struktural Aparatur Daerah	Input : Dana	Rupiah	458.750.000,-	458.507.250,-	100 %	
		Output : Terlaksananya DIKLATPIM Tk. II, III dan IV bagi Pejabat Struktural	Orang	55	55 orang	100 %	
		Outcome : Terdidik dan Terlatihnya Pejabat Struktural	Orang	55	55 orang	100 %	
2. Penyelenggaraan DIKLAT Teknis Fungsional Aparatur Daerah.	1. Penyelenggaraan DIKLAT Manajemen Pengelola Pasar	Input : Dana	Rupiah	80.000.000,-	80.000.000,-	100 %	
		Output : Terlaksananya DIKLAT Manajemen bagi Pengelola Pasar	Orang	40 orang	40 Orang	100 %	
		Outcome : Terlatihnya Pengelola Pasar	Orang	40 orang	40 orang	100 %	
	2. Penyelenggaraan Diklat Bom Tobe Succes	input : Dana	Rupiah	90.000.000,-	90.000.000,-	100 %	
		Output : Terlaksananya DIKLAT Bom Tobe Succes bagi Pejabat Struktural	Orang	30 orang	30 Orang	100 %	
		Outcome : Terdidik & terlatihnya Pejabat Struktural	Orang	30 Orang	30 Orang	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Operasional Pemb KB di Era Otda	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Operasional Pemb KB di Era Otda bagi Petugas KB Outcome : Terdidiknya Petugas KB	Rupiah Orang Orang	105.000.000,- 40 orang 40 orang	105.000.000,- 40 Orang 40 orang	100 % 100 % 100 %	
	4. Penyelenggaraan Diklat Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Input : Dana Output : Terlaksananya Diklat Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih Outcome : Jumlah lulusan diklat	Rupiah Orang Orang	105.000.000,- 40 orang 40 orang	104.610.000,- 40 Orang 40 orang	99.63 % 100 % 100 %	
	5. Penyelenggaraan Diklat Teknik Budi daya Perikanan	Input : Dana Output : Jumlah peserta Diklat Teknik Budidaya Perikanan Outcome : Jumlah lulusan diklat	Rupiah Orang Orang	60.000.000,- 30 orang 30 orang	60.000.000,- 30 Orang 30 orang	100 % 100 % 100 %	
	6. Penyelenggaraan TOT KIR SMU/SMK	Input : Dana Output : Terlaksananya TOT KIR SMU/SMK Outcome : Terlatihnya Guru SMU/SMK dalam KIR	Rupiah Orang Orang	60.000.000,- 20 orang 20 orang	59.990.000,- 20 Orang 20 orang	99,98 % 100 % 100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Penyelenggaraan Diklat PPGD	Input : Dana	Rupiah	127.500.000,-	125.490.000,-	98,42 %	
		Output : Terlaksananya Diklat PPGD bagi Tenaga Medis/Para Medis	Orang	40 orang	40 Orang	100 %	
		Outcome : Terlatihnya Tenaga Medis/Para Medis	Orang	40 orang	40 orang	100 %	
	8. Penyelenggaraan Diklat Kepenilikan PLS	Input : Dana	Rupiah	112.800.000,-	111.875.000,-	99,18 %	
		Output : Terlaksananya Diklat Kepenilikan bagi PLS	Orang	40 orang	40 Orang	100 %	
		Outcome : Terlatihnya PLS	Orang	40 orang	40 orang	100 %	
	9. Penyelenggaraan Diklat Guru Kelas IV.V,VI SD Angk. I	Input : Dana	Rupiah	125.670.000,-	125.545.000,-	99,83 %	
		Output : Terlaksananya Diklat bagi Guru Kelas IV.V,VI SD Angk. I	Orang	40 orang	40 Orang	100 %	
		Outcome : Terlatihnya Guru Kelas IV.V,VI SD	Orang	40 orang	40 orang	100 %	
	10. Penyelenggaraan Diklat Guru Mata Pelajaran Matematika Tk. SMP	Input : Dana	Rupiah	127.500.000,-	127.290.500,-	99,84 %	
		Output : Terlaksananya Diklat bagi Guru Mata Pelajaran Matematika Tk. SMP	Orang	40 orang	40 Orang	100 %	
		Outcome : Terlatihnya Guru Matematika SMP	Orang	40 orang	40 orang	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Bimbingan disiplin pegawai dan izin perkawinan/perceraian	Penyelenggaraan bimbingan disiplin pegawai dan izin kawin/cerai	Input : Dana Output : Jumlah kasus indisipliner PNS yang terselesaikan Pengadaan buku pedoman peraturan perkawinan/perceraian Outcome : % peningkatan penyelesaian kasus indisipliner PNS	Rupiah kasus Eks %	23.571.500,- 25 kasus 250 eks 80 %	16.935.700,- 22 kasus 250 eksemplar 88 %	71,85 % 88 % 100 % 110 %	
4. Peningkatan pelayanan karier PNS	1. Pemrosesan pengajuan kenaikan pangkat	Input : Dana Output : Usulan KP yang diproses Outcome : SK KP yang diterbitkan	Rupiah Berkas Lembar	65.000.000,- 2550 berkas 2550 lembar	63.999.800,- 2547 berkas 2547 lembar	98,46 % 99,8 % 99,8 %	
	2. Penyediaan SIMPEG	Input : Dana Output : Data yang diproses Outcome : % Pemutakhiran data pegawai	Rupiah Data %	30.923.300,- 11.000 data 95 %	28.204.150,- 10.450 data 95 %	91,21 % 95 % 100 %	
5. Peningkatan Pelayanan PAK	Pemrosesan PAK Jabatan Fungsional	Input : Dana Output : Berkas yang diproses Outcome : SK PAK yang diterbitkan	Rupiah Berkas Lembar	13.007.500,- 1500 berkas 1500 lembar	11.427.500,- 1442 berkas 1442 lembar	87,85 % 96,13 % 96,13 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
6. Penyelenggaraan ujian dinas	Pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat	Input : Dana Output : Penyelenggaraan ujian dinas KP Outcome : Jumlah PNS yang lulus ujian	Rupiah Orang Orang	14.564.150,- 150 orang 150 orang	9.224.600,- 46 orang 46 orang	63,34 % 30,8 % 30,8 %	
7. Pengadaan CPNS yang proporsional	1. Penyelenggaraan analisa kebutuhan pegawai	Input : Dana Output : Data yang dianalisa Outcome : Data analisa yang dihasilkan	Rupiah Unit eksemplar	9.900.000,- 45 unit 5 eksemplar	9.852.900,- 45 unit 5 eksemplar	99,52% 100 % 100 %	
	2. Pengadaan CPNS Th. 2005 yang diselenggarakan tahun 2006	Input : Dana Output : Pengadaan CPNS th. 2005 Outcome : Jumlah CPNS yang terekrut	Rupiah Kegiatan Orang	282.300.000,- 1 kegiatan 583 orang	282.300.000,- 1 kegiatan 576 orang	100 % 100 % 98,6 %	
	Pengadaan CPNS Th. 2006 dan pengadaan bantuan Pol PP	Input : Dana Output : Pengadaan CPNS th. 2006 Outcome : Jumlah CPNS yang terekrut Jumlah Pol PP yang terekrut	Rupiah Kegiatan Orang Orang	495.000.000,- 2 kegiatan 894 orang 70 orang	114.302.850,- 1 kegiatan 0 orang 70 orang	23,1 % 50 % 0 % 100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
8. Psikotes bagi PNS	Penyelenggaraan psikotes bagi PNS	Input : Dana Output : Penyelenggaraan psikotes PNS Outcome : Data hasil psikotes PNS	Rupiah Orang Orang	36.885.000,- 67 orang 67 data	36.885.000,- 67 orang 67 data	100 % 100 % 100 %	
9. Pengambilan sumpah janji PNS	Penyelenggaraan sumpah jabatan	Input : Dana Output : Pengadaan sumpah jabatan Outcome : PNS yang diambil sumpah jabatan	Rupiah Orang Orang	11.294.550,- 240 orang 240 orang	9.219.550,- 228 orang 228 orang	81,6 % 95 % 95 %	
10. Bimbingan ketatausahaan kepegawaian	Penyelenggaraan bimbingan dan monitoring ketatausahaan kepegawaian	Input : Dana Output : Penyelenggaraan Bimtek dan monitoring ketatausahaan kepeg. Outcome : Jumlah Pengelola Kepegawaian yang dibimtek	Rupiah Kegiatan Orang	21.330.000,- 2 kegiatan 40 orang	21.330.000,- 2 kegiatan 40 orang	100 % 100 % 100 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2006**

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

Formulir PPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya kualitas diklat Aparatur	Jumlah peserta DIKLATPIM Tk. II, III dan IV	55 orang	55 Orang	100 %	
	Jumlah peserta DIKLAT Manajemen Pengelola Pasar	40 orang	40 Orang	100 %	
	Jumlah peserta DIKLAT Bom Tobe Sukses	30 orang	30 Orang	100 %	
	Jumlah peserta Diklat Manajemen Operasional Pemb.KB di Era Otonoda	40 orang	40 Orang	100 %	
	Jumlah peserta DIKLAT Prosedur Pengawasan dan Sertifikasi Benih	40 orang	40 Orang	100 %	
	Jumlah peserta DIKLAT Teknik Budidaya Perikanan	30 orang	30 Orang	100 %	
	Jumlah peserta TOT KIR/LDKS bagi SMU/SMK Negeri/Swasta	20 orang	20 Orang	100 %	
	Jumlah peserta Diklat PPGD	40 orang	40 Orang	100 %	
	Jumlah peserta Diklat Kepemilikan PLS	40 orang	40 orang	100 %	
	Jumlah DIKLAT Guru Kelas IV,V,VI SD	40 orang	40 orang	100 %	

1	2	3	4	5	6
	Jumlah peserta Diklat Guru Mata Pelajaran Matematika Tk. SMP	40 orang	40 orang	100 %	
2. Meningkatnya ketaatan Aparatur Pemerintah pada peraturan kepegawaian	% Menurunnya jumlah kasus indisipliner dan cerai PNS	20 %	12 %	60 %	
3. Meningkatnya pelayanan dan informasi kepegawaian secara cepai, tepat dan akurat	Jumlah penanganan pelayanan karier PNS	2500 orang	2547 Orang	101,9 %	
	SIMPEG, Validasi data PNS	11.000 data	10.450 data	95 %	
4. Meningkatnya kualitas pengembangan karier Aparatur Pemerintah Daerah yang obyektif dan proporsional	Penanganan pelayanan FAK	2000 FAK	2029 FAK	101,5 %	
	Jumlah PNS lulus ujian dinas KP	150 orang	45 orang	30,8 %	
	Jumlah penyalangan CPNS th. 2005	583 orang	576 orang	98,80 %	
	Jumlah penyalangan CPNS th. 2006				
	Jumlah penyalangan Pol PP	67 % orang	67 % orang	100 %	
	Jumlah peserta penyelenggaraan psikotes				
	Jumlah PNS yang diambil sumpahnya				
5. Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan kepeg	Jumlah Pengelola Kepegawaian yang diikutkan dalam bimtek ketatausahaan	40 orang	40 orang	100 %	